

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN JUAL RUGI YANG MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Nomor 3/KPPU-L/2020)**

**Muhammad Ragiq Farhan\***

Salah satu praktik yang cukup menjadi perhatian akhir-akhir adalah masalah *predatory pricing* atau juga disebut dengan istilah praktik jual rugi yang dilakukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement dalam penjualan Semen di Kalimantan Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai jual rugi dalam persaingan usaha di Indonesia, akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam kasus jual rugi yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat sesuai dengan Putusan Nomor 3/KPPU-L/2020.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan normatif terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengaturan predatory pricing dalam persaingan usaha di Indonesia yakni menggunakan Pasal 20 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ditentukan sedemikian rupa yaitu :Sanksi administrative, Sanksi pidana pokok dan Sanksi pidana tambahan. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja), batas maksimal denda dalam sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Larangan Monopoli dihapus dengan Pasal 118 Undang-Undang Cipta Kerja. Pertimbangan Hakim dalam kasus jual rugi yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat sesuai dengan Putusan Nomor 3/KPPU-L/2020, dalam menjatuhkan sanksi Terlapor yang penulis temukan pada dokumen putusan tersebut ialah mengacu pada Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**Kata Kunci:** **Tinjauan yuridis, Pelaku Usaha, Jual Rugi, Persaingan Usaha Tidak Sehat**

\* Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**ABSTRACT**  
**JURIDICAL REVIEW FOR BUSINESS DOORS THAT RESULT IN  
UNFAIR BUSINESS COMPETITION**  
**(Study of Decision Number 3/KPPU-L/2020)**

**Muhammad Rafiq Farhan\***

*One practice that has received considerable attention recently is the issue of predatory pricing or also known as the practice of selling at a loss by PT Conch South Kalimantan Cement in selling cement in South Kalimantan.*

*This study aims to find out the legal arrangements regarding selling and loss in business competition in Indonesia, the legal consequences for business actors who practice selling and losing practices resulting in unfair business competition and to find out the judge's considerations in selling and loss cases which result in unfair business competition in accordance with Decision Number 3/KPPU-L/2020.*

*This study uses a normative juridical method using an applied normative approach with the type of judicial case study, namely the legal case study approach. Data collection techniques were carried out through library research.*

*The results of the study show that: Predatory pricing arrangements in business competition in Indonesia, namely using Article 20 of Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The legal consequences for business actors who practice selling at a loss resulting in unfair business competition based on Law Number 5 of 1999, are determined in such a way as follows: Administrative sanctions, principal criminal sanctions and additional criminal sanctions. Since the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law), the maximum fine in administrative sanctions that can be given to business actors who violate the provisions of the Monopoly Prohibition Law is removed by Article 118 of the Job Creation Law. The Judge's considerations in the sale and loss case which resulted in unfair business competition in accordance with Decision Number 3/KPPU-L/2020, in imposing sanctions on the Reported Party that the authors found in the decision document referred to Article 47 paragraph 2 Law Number 5 of 1999 as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation.*

**Keywords:** *Juridical Review, Business Players, Loss and Losses, Unfair Business Competition*

\*Students of the Postgraduate Program in the Law Program at the Islamic University of North Sumatra